

## COLONIALISM AND PEASANT RESISTANCE IN SOUTHEAST ASIA

**Putra Hidayatullah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: putra.hidayatullah@ar-raniry.ac.id

### Abstract

Colonialism in Global South countries such as Southeast Asia has been marked by the response of local communities, especially farmers, in various forms of protest. The protests are rooted in problems with the economic system. The colonial rulers brought a different economic logic with a new mode of production for traditional farmers. In response to these protests, the colonial government was assisted by the presence of local elites. This article will analyze peasant resistance in Indonesia, Vietnam, and the Philippines with the argument that although local elites were involved, they had different ways of dealing with resistance. In addition to the problems of the economic system, colonialism also brought modernity which had an impact on the disintegration of the social system.

**Keywords:** *Peasant resistance; Local elites, colonialism, Southeast Asia*

## KOLONIALISME DAN PEMBERONTAKAN DI ASIA TENGGARA

### Abstrak

Kedatangan kolonialisme Eropa ke negara-negara jajahan seperti di Asia Tenggara telah ditandai dengan respon masyarakat lokal terutama petani dalam beragam bentuk protes. Protes tersebut berakar pada persoalan sistem ekonomi. Penguasa kolonial membawa logika ekonomi berbeda dengan mode produksi baru bagi para petani tradisional. Dalam menanggapi protes tersebut, pemerintah kolonial dibantu oleh keberadaan elit lokal. Artikel ini akan mengurai perlawanan petani di Indonesia, Vietnam dan Filipina dengan argumen bahwa meski elit lokal ikut terlibat, tetapi mereka memiliki cara berbeda dalam menangani perlawanan. Selain persoalan sistem ekonomi, kolonialisme juga membawa modernitas yang memberi dampak terhadap disintegrasi sistem sosial.

**Kata Kunci:** *Perlawanan petani; Elit lokal; kolonialisme; Asia Tenggara*

### Pendahuluan

Didukung oleh kondisi alam yang subur sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan Jawa hidup dari hasil padi, kopi, dan hasil

pertanian lainnya. Sebelum kolonialisme datang, secara umum mereka hidup di bawah sistem tradisional. Posisi tertinggi dalam masyarakat dipimpin oleh raja. Raja

memerintah dan mengatur segala aspek dengan dibantu oleh para punggawa. Sistem ini bisa disebut dengan feodalisme. Terdapat ciri yang umum dalam feodalisme yaitu dalam hal sarana produksi. Sistem produksi ditandai dengan kepemilikan sarana produksi oleh raja atau keluarga raja. Raja dipersepsikan menguasai area tanah. Ia yang kemudian memberikan jatah pinjam kepada petani untuk mengolahnya. Raja juga memberikan jaminan keamanan dengan memanfaatkan perangkat militer. Sebagai imbalan, petani diharuskan membayar upeti dengan jumlah yang telah ditentukan. Upeti tersebut bisa dalam beragam bentuk dan tergantung pada apa yang ditanami oleh masyarakat seperti hasil tani berupa beras, jagung, dan lainnya. (O'Flaherty 1981, 207) Pada sistem ini terjadi hubungan *patron-clients* yang kuat antara kaum petani dengan raja. Mereka diikat dengan sumpah yang berfungsi sebagai kontrak. Contoh ini dapat kita temukan misalnya di Jawa. Tanah dipercaya milik Tuhan dan raja adalah titisan Tuhan di dunia. Raja

menduduki strata sosial tertinggi dan karena itu kepemilikan tanah sepenuhnya milik raja dan merupakan kewajiban bagi para petani membayar upeti. Ciri lain dari sistem ekonomi feodal adalah corak produksi yang berorientasi sebatas untuk konsumsi (subsistence) atau upacara-upacara. (Bernstein 2010, 28).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif tulisan ini mencoba mengurai dan menganalisa peristiwa dalam sejarah kolonialisme di Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Dengan merujuk kepada literatur dan hasil penelitian dengan bahasan yang terkait, penulis mencoba memeriksa pola bagaimana kolonialisme, elit lokal, dan perlawanan terjadi terutama dengan melihat aspek politik ekonomi di tiga negara yang terletak di Asia Tenggara tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana perubahan sarana produksi dari tradisional ke modern telah memicu perlawanan-perlawanan. Tulisan ini mencoba menemukan bagaimana pola yang berlangsung tersebut

memiliki garis singgung yang sama sekaligus juga beberapa faktor yang membuat masing-masing konteks menjadi lebih khusus.

### Hasil dan Pembahasan

Kolonialisme Eropa hadir bersama dengan logika ekonomi kapitalisme yang kemudian diterapkan untuk masyarakat agraria di negara-negara ketiga seperti Asia, Amerika Latin dan Afrika. Dalam sistem ini terjadi penghapusan atau pengalihan pola sehingga sarana produksi menjadi milik sekelompok orang yang disebut dengan kapitalis. Petani atau buruh kemudian terpisah dengan sarana produksi dan harus menjual tenaganya untuk industri. Selain teralienasi dari sistem produksi mereka juga terlepas dari hasil produksi. Mereka dibayar dalam bentuk gaji. Seiring dengan ini muncul komodifikasi untuk tenaga dan produk yang dihasilkan buruh. Dalam sistem kapitalisme buruh tidak terikat sebagaimana hubungan patron client antara petani dengan raja. Namun di sisi lain mereka mengalami bentuk eksploitasi dalam bentuk berbeda.

Kapitalisme mengambil surplus atau nilai lebih yang mereka hasilkan.

Sistem ini awalnya dibawa ke negara-negara ketiga melalui proses awal yang disebut dengan periode merkantilisme yang didukung karena terjadinya renaissance di Eropa. Pada fase ini negara-negara Eropa mempromosikan penjelahan-penjelahan demi keuntungan dagang mulai dari Asia sampai Afrika dengan praktik monopoli atas wilayah koloni. Fase ini kemudian berlanjut pada kolonialisme. Dalam usaha mengubah logika ekonomi ini pemerintah kolonial melakukan pendekatan berbeda-beda. Beberapa mengubah secara total dan beberapa mencangkok struktur ekonomi lokal. Di Amerika Latin dan Karibia pemisahan petani dari kepemilikan tanah secara paksa kemudian mengirim budak sebagai pekerja yang menyumbang surplus dari pertanian katun dan tembakau. Di Asia dilakukan dengan memanfaatkan sistem awal yang telah ada melalui petinggi-petinggi

---

lokal seperti yang berlaku di Jawa. (Ibid, 44).

Ciri logika ekonomi kapitalisme adalah akumulasi, ekspansi, dan eksploitasi. Ciri ini pula juga dapat ditemukan dalam wilayah-wilayah yang menjadi koloni seperti di Vietnam, Philipina, dan juga Indonesia. Di antara faktor yang mengakibatkan dampak yang signifikan adalah ketika pada akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 terjadi konsolidasi kapitalis di tingkat dunia. Sebagai akibat dari ini munculnya pasar global diiringi dengan kebutuhan yang luas dari hasil tani seperti karet, cokelat, minyak kelapa sawit, kopi, teh, dan lainnya terutama untuk konsumen negara-negara industri. Keadaan ini kemudian mendorong penguasa kolonial untuk menambah komoditas tersebut untuk kebutuhan pasar. Periode ini menjadi awal lahirnya perubahan signifikan dalam dunia pertanian wilayah-wilayah jajahan di Asia.

Dalam sistem ini petani atau buruh kemudian dipisahkan oleh alat produksi. Selain terasing dari sistem produksi mereka, mereka

juga tidak terkait dengan produksi. Mereka dibayar dalam bentuk upah tanpa mengganggu proses harga dan akumulasi yang dihasilkan. Bersamaan dengan itu muncul istilah komodifikasi bagi buruh dan produk yang dihasilkan oleh buruh. Di satu sisi, dalam sistem kapitalisme buruh tidak terikat sebagai patron hubungan klien antara petani dan raja. Pekerja bebas menjual kekuasaan kepada 'individu' yang mereka sukai. Namun di sisi lain mereka mengalami bentuk-bentuk eksploitasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Kapitalisme mengambil surplus dari apa yang mereka hasilkan

Salah satunya adalah munculnya istilah industri pertanian. Dalam pada ini penguasa kolonial melakukan kebijakan perluasan wilayah pertanian yang melampaui batas-batas awal yang semula dipraktikkan kaum tani. Di Vietnam, pemerintah kolonial Perancis melakukan kebijakan perluasan wilayah pertanian dipicu oleh hasrat untuk surplus beras. Sebagai akibatnya terjadi perubahan dalam model

kepemilikan tanah. Sebelumnya tanah dimiliki oleh beberapa kelompok orang dengan skala kecil, tuntutan pasar dan kebutuhan untuk surplus yang lebih besar menyebabkan munculnya kelas baru dalam kepemilikan tanah. Mereka adalah kelas yang memiliki tanah yang luas. Hal ini ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah menjajah lahan-lahan baru dengan merebutnya dari tangan petani. Kedua adalah memanfaatkan lahan-lahan lapang yang kering yang selama ini tidak terpakai untuk sarana pertanian. Dalam upaya melakukan ini pemerintah memanfaatkan teknik irigasi melalui konstruksi hidrolis. Teknik ini kemudian berhasil mengalirkan air dan mengubah lahan yang tadi tidak terpakai tempat baru untuk penanaman. Tidak cukup dengan beras, komoditi lain yang tidak luput dari perhatian pemerintah adalah karet. (Eric Wolf 1999, 165)

Kejadian ini memberi dampak yang nyata bagi para petani. Pada sistem inilah mulai terjadi proses proletarianisme. Kepemilikan tanah yang luas oleh segelintir pemilik

tanah baru mengubah status petani menjadi pekerja atau buruh di industri pertanian. Kasus ini seperti yang terjadi di Vietnam. Akibat dari pengalihan ini memberi berpengaruh terhadap kepemilikan dan akses terhadap tanah. Enam puluh satu persen dari rata-rata keluarga menjadi tidak memiliki tanah. Tanah terkonsentrasi pada segelintir orang terutama perusahaan. Menghadapi ini para petani menjadi mengalami frustrasi. Pengalihan tanah di Vietnam ini juga merupakan bagian tuntutan dari kebutuhan pasar dunia. Ini menuntut penguasa kolonial memperluas lahan. Beberapa lahan yang dialihkan itu merupakan tanah milik mereka yang terbunuh dalam pergolakan Vietnam pada 1862. (ibid, 166).

Ketika para petani pergi dengan lahan yang terlantar, biasanya lama dan setelah pertempuran berhenti, mereka kembali ke desa mereka dan mulai mengetahui bahwa tanah-tanah ini sekarang menjadi milik orang lain. Mereka merasa marah. Dan di antara mereka yang bersikeras atas hak milik mereka kemudian

diperlakukan seperti pencuri dan diusir. Mereka hanya bisa bertahan jika mereka menerima tawaran pemilik baru untuk menggarap tanah, atau menyewa sebagian kecil dengan harga selangit—umumnya tidak kurang dari setengah hasil panen (Buttinger, 1967, 164).

Namun demikian, di beberapa tempat pemerintah kolonial tetap menggunakan sistem feodal ini dalam praktik-praktik ekonomi. Di Jawa proses proletarianisasi petani tidak berbeda dengan di Vietnam. Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan yang merugikan para petani. Petani tetap mengelola tanah sebagaimana biasa namun mereka dipaksakan bekerja dan menanam tanaman yang ditentukan oleh penguasa kolonial. Ini terjadi dipicu oleh krisis yang terjadi di Negara Belanda. Untuk meningkatkan pemasukan, mereka melakukan kebijakan kultursteel. Mereka menentukan harganya. Proses ini terjadi di Jawa di bawah kepemimpinan Johannes Van Des Bosch di tahun 1830. Di Jawa pemerintah kolonial mengadopsi sistem feodal lama dengan menjadikan elit lokal sebagai

mandor atau pengendali. Sistem kehidupan masyarakat Jawa yang tunduk pada kaum priyayi membuat masyarakat menjadi patuh menuruti perintah yang diberlakukan. Dalam kasus ini praktik kapitalisme tidak secara menyeluruh menghapus struktur yang telah ada dalam masyarakat lokal. Kebijakan penghapusan atau memodifikasi itu berdasarkan pada keefektifan untuk akumulasi. (Kartodirdjo 1974, 154).

Dalam proses baru tersebut logika ekonomi mulai bekerja. Sebagaimana telah disebutkan di atas dalam uraian tentang kapitalisme, perubahan ini utamanya terjadi dalam hal corak produksi. Petani yang sebelumnya bekerja untuk mendapatkan hasil panen sebatas pada konsumsi dan upeti juga upacara-upacara, pada sistem yang baru ini mereka menjadi harus bekerja untuk kebutuhan pasar. Pasar yang dimaksud adalah pasar global yang di dalamnya pemerintah menjadi aktor. Sebelumnya hasil produksi petani yang ada tidak menjadi tujuan untuk ekspor. Meski proses ekspor terjadi tetapi jumlah tersebut tidak

signifikan. Kedatangan Perancis dengan menerapkan logika ekonomi tersebut mendorong terjadinya peningkatan dalam kuantitas komoditi. Tercatat bahwa ekspor yang terjadi di tahun 1937 mencapai hingga 1.548.000 tons. (Eric Wolf 1999, 165)

Secara umum fase proletarianisasi ini pula yang membuat mata rantai dari patron client menjadi terputus. Di sini pula terjadi pemutusan dan transisi signifikan dari sistem feodal ke sistem kapital. Petani yang sebelumnya bekerja untuk penghidupan sehari-hari dari hasil pertanian, dalam pada ini mereka menjadi pekerja upahan. Proses ini disebut juga dengan komodifikasi. Selain produk yang dihasilkan, tenaga yang dikeluarkan petani menjadi komoditas. Mereka dibayar dengan sistem upah. Tenaga mereka dibayar dengan uang untuk konsumsi dan membeli barang-barang. Pada fase ini masyarakat diperkenalkan dengan sistem uang atau monetasi. Proses monetasi ini juga alat yang dipakai untuk memperlancar arus akumulasi dan sistem kapitalisme.

Dengan memperkenalkan sistem uang ini kelas pekerja terangsang untuk mengubah orientasi menanam, bukan lagi untuk keperluan makan dan perayaan (subsistence), tetapi untuk mencapai kebutuhan baru yaitu memperoleh keuntungan uang. Masuknya uang ke Jawa beriringan dengan masuknya barang-barang impor yang diperkenalkan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari ini para petani memiliki kebutuhan baru terhadap barang-barang. Petani yang bekerja dan menjual tenaganya demi uang kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan komoditas baru. Masuknya barang-barang ini mendorong keinginan untuk membeli. Sebagai akibatnya jumlah uang yang keluar dari desa semakin tinggi. Kebutuhan akan uang semakin lama semakin tinggi. Pekerja harus kembali menjual tenaga mereka ke perusahaan.

Masuknya sistem uang ini memicu terjadinya perubahan pola relasi sosial. Seperti di Jawa misalnya, selain hubungan patron clients menjadi terlepas dan petani bekerja untuk menjual tenaganya,

mereka menjadi tidak terikat pada satu majikan dan mereka dapat menjual barang-barang produksi untuk pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan. Penentuan harga ini terkadang sangat murah dan merugikan para petani. Di Vietnam misalnya, petani garam mendapati harga jual garam dengan harga beli bisa selisih mulai dari enam hingga delapan kali lebih tinggi (Eric Wolf 1999, 170). Dengan kata lain, monetasi memberikan keuntungan lain kepada pemerintah melalui penentuan harga barang yang kurang fair.

Sementara itu, bertalian dengan monetasi ini, diperkenalkan pula sistem pajak. Pemberlakuan pajak uang ini memperlancar logika ekonomi yang ada. Di sini lain, logika pajak ini mirip seperti pola relasi yang telah ada dalam sistem feodalisme. Dalam sistem feodalisme para petani diharuskan membayar pajak sebagai imbalan dari jaminan ekonomi yang diberikan oleh raja. Namun pajak yang diberikan tidak berupa uang tetapi barang dari hasil pertanian itu sendiri. Namun dalam

feodalisme upeti yang diberikan disesuaikan dengan kondisi hasil panen. Dalam sistem kapitalisme ini negara dianggap penjamin keamanan. Dengan demikian kelas pekerja menjadi harus membayar pajak dalam bentuk uang. Di beberapa tempat seperti Vietnam pajak ini digunakan untuk meningkatkan percepatan dalam sarana transportasi seperti pembangunan rel kereta api, dan jalan raya untuk mengangkut hasil produksi atau barang-barang impor.

Namun demikian pemberlakuan pajak atau taxation ini memberi dampak lain kepada petani. Terutama ketika biaya pajak meningkat tidak sesuai dengan kontrak mereka yang menjerat dan dianggap eksploitatif. Di Vietnam pajak yang semula 35 million gold franc ditingkatkan menjadi 90 million gold franc. Pajak yang tinggi diberlakukan untuk komoditi seperti garam, alkohol, dan opium. Untuk garam misalnya masyarakat diharuskan menjualnya kepada pemerintah dengan harga yang telah mereka tentukan. Sebagaimana yang pernah disebutkan di atas, perbedaan harga

yang jual dengan harga beli bisa mencapai antara enam sampai dengan delapan kali lebih tinggi (Eric Wolf 1999, 176).

Sementara gaji yang diterima juga terbatas, Pemberlakuan pembayaran pajak langsung dengan uang juga mendorong munculnya kebutuhan yang tinggi terhadap uang. Dalam keadaan seperti ini muncul segolongan kelompok rentenir. Mereka digerakkan oleh motif keuntungan yang diperoleh dari aktifitas ini. Situasi krisis dengan tingkat kebutuhan uang yang tinggi ini memunculkan inisiatif untuk meminjam uang kepada pemerintah. Uang yang dipinjam ini kemudian dipinjamkan lagi kepada para pekerja yang kemudian mereka gunakan baik untuk membayar pajak maupun membeli konsumsi atau barang-barang import. Peminjaman ini disertai dengan kredit bunga yang memberi laba kepada para rentenir (ibid). Dengan kata lain, Kebutuhan akan uang untuk membayar pajak dan membeli barang-barang melancarkan sistem monetasi dalam kapitalisme sekaligus memicu krisis sosial.

Di Luzon Philipina persoalan proletarianisasi juga dialami oleh para petani. Beras menjadi komoditi penting seiring dengan meningkatnya jumlah populasi. Namun meski para petani yang menjadi pelaku utama pertanian, mereka tidak memperoleh keuntungan. Surplus besar dari hasil tani justru dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau industry beras. Terutama para petani yang berada di San Ricardo (Kerklied 1972, 46). Sebaliknya para petani menjadi terikat dengan hutang. Kondisi ini membuat petani terikat pada pinjaman uang namun dengan jumlah bunga yang tinggi. Para petani menjadi berjarak dengan kultur sosial tradisionalnya sebelumnya. Sementara di saat bersamaan mereka tidak dapat melepaskan diri dari kondisi sosial yang mengikat mereka. Penyebab lain adalah berkurangnya lahan-lahan komunal yang dimiliki bersama. Beberapa tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi dimiliki oleh pemilik tanah yang baru (Kerkvliet 1972, 51). Terdapat peraturan yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi maksimal

terhadap tanah umum adalah sebesar 16 hektar. Sementara perusahaan dapat memiliki sampai dengan 1024 hektar (ibid). Masalah lain kemudian muncul ketika para petani menjadi buruh dari para pekerja tuan tanah. Mereka menemukan kontrak antara pemilik tanah dan pekerja yang tidak setara. Dalam hukum, para petani menemukan ketidakpuasan. Salah satunya adalah isi undang-undang yang menyatakan bahwa tuan tanah diberikan waktu untuk mengelola tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah selama satu tahun. Sebagian besar undang-undang ini mendukung tuan tanah yang juga memiliki pengaruh dalam undang-undang. Demikian pula di Banten Kartodirjo mencatat bahwa:

“Keluhan masyarakat tentang perpajakan semakin diperparah dengan kelangkaan uang dan rendahnya harga yang harus dibayar untuk *produk* agraria. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa terulangnya kerusuhan sosial adalah akibat langsung dari penetrasi ekonomi uang dalam

masyarakat Banten” (Kartodirdjo 1966, 106)

Persoalan lain kemudian muncul ketika para petani menjadi buruh pekerja pada tuan tanah. Mereka mendapati kontrak antara pemilik tanah dengan pekerja tidak seimbang. Dalam undang-undang tersebut para petani mendapati ketidakpuasan. Salah satunya adalah isi undang-undang yang menyebutkan bahwa kaum tuan tanah diberikan waktu mengelola tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah selama satu tahun. Kebanyakan undang-undang ini memihak kepada kaum tuan tanah yang juga memiliki pengaruh dalam pembuatan legislasi.

Kontradiksi sistem yang ada memicu resistensi di kalangan petani. Beberapa kelompok perlawanan juga muncul dan memicu pemberontakan terjadi di Banten. Faktor yang mempengaruhinya juga terkait dengan pengutipan uang untuk kepentingan pajak (taxation). Kenaikan biaya pajak dan ditambah dengan kurangnya jumlah uang dan di saat bersamaan diperparah dengan harga produk pertanian

yang dibeli murah membuat pemberontakan terjadi. Tapi perlawanannya lebih kompleks. Disintegrasi sistem sosial dan sistem politik tradisional serta terkait dengan terganggunya nilai-nilai tradisional dengan hadirnya modernitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh ide Islam yang dipadukan dengan imajinasi untuk mengembalikan tatanan lokal masa lalu (Kartodirdjo 1966, 108). Sentimen agama menjadi salah satu alat penggerak massa apalagi dengan doktrin perang suci melawan penguasa kolonial yang diam-diam disebarkan melalui ajaran agama di tempat-tempat pengajian. Pengaruh ini tidak hanya disebabkan oleh elit agama di tingkat lokal tetapi juga hubungannya dengan dunia Arab ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beberapa tokoh menonjol dalam kelompok ini terhubung dengan aktor-aktor perlawanan dengan nasib yang sama di belahan bumi yang lain. Mereka melihat kolonialisme sebagai persoalan yang sama dan berdampak terhadap masa depan umat Islam (Ibid, 148).

Pada bagian ini persoalan ditambah dengan pemaksaan terhadap petani atau pekerja pertanian. Mereka harus bekerja menurut peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Eric Wolf menyebutkan bahwa setiap petani harus bekerja dari pagi sekali hingga jelang malam. Mereka diberi gaji dan dengannya membeli makanan pada Cai. Selain itu mereka akan memperoleh penghukuman apabila tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa petani memutuskan untuk melarikan diri.

### **Elit Lokal**

Di bawah industri pertanian yang dikelola penguasa kolonial yang didukung oleh elit lokal. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam menjalankan misi kolonialisme para petinggi kolonial tidak menjalankan praktek eksploitasi terhadap petani sendiri. Mereka juga turut melibatkan elit lokal dengan memberi mereka kewenangan di bawah administrasi kolonial. Elit lokal tersebut merupakan orang yang dalam

struktur feodal sebelumnya adalah orang yang memiliki pangkat. Contohnya adalah kekuasaan Perancis di Vietnam yang mempengaruhi dua hal yaitu perluasan kekuasaan yang diberikan kepada petinggi kampung untuk membuatnya menjadi perwakilan sistem kolonial. Keberadaan elit lokal merupakan bagian dari sistem control pemerintah terhadap masyarakat. (Eric Wolf).

Di Jawa mereka juga melakukan sistem yang sama. Elit-elit lokal diangkat menjadi bagian sistem kolonial. Pada tahun 1830, misalnya, pejabat kolonial di bawah kekuasaan Johannes Van Des Bosch menjalankan kebijakan tanam paksa dengan memakai elit lokal untuk praktik tanam paksa karena pengaruh mereka secara kultural (feodalisme) dapat menggerakkan rakyat untuk patuh pada kebijakan pemerintah dan bekerja untuk menghasilkan lebih banyak hasil produksi. Karena terikat secara administrasi dan pangkat kepada sistem belanda, mereka ikut terlibat dalam meredam pemberontakan yang dilakukan oleh para petani.

Sebagai imbalan dari usaha mereka menumpas pemberontakan petinggi kolonial memberi mereka balasan berupa kenaikan pangkat dan penghargaan lainnya.

Sementara di Filipina elit lokal yang diangkat memiliki kedudukan dan posisi lebih tinggi yaitu sebagai presiden *common wealth*. President Coezent adalah presiden pertama yang berasal dari Filipina. Ia memiliki pengaruh dan jabatan tinggi yang kemudian dianggap terlalu menghabiskan waktu mengurus perdagangan ketimbang mengurus persoalan internal. Dalam hal ini, pemberontakan yang terjadi di Filipina juga disebabkan oleh munculnya tuan tanah yang memiliki pengaruh dalam proses penentuan perundang-undangan yang merugikan kaum tani. Kasus ini berbeda dengan yang terjadi di Banten.

Sistem yang ada dianggap tidak mampu memberikan kepuasan dari sistem sosial ekonomi yang ada. Untuk mengontrol para petani pemerintah memberlakukan undang-undang.

## Perlawanan

Ada beberapa jenis perlawanan berbeda untuk merespon krisis yang dialami oleh para petani ini. Bentuk perlawanan ini terus berkembang. Tercatat bahwa sebelum masuknya kolonialisme telah terdapat perlawanan yang dilakukan oleh sebagian petani. Perlawanan ini dilakukan secara diam-diam terhadap tuan tanah. Umumnya serangan lari. Seiring berjalannya waktu mereka beradaptasi dengan sistem kolonial dan membentuk perkumpulan. Kemampuan berorganisasi ini juga bagian dari pelajaran yang mereka dapatkan melalui sistem kolonial. Sebelumnya para petani melakukan protes diam-diam dengan menyerang tuan tanah tetapi kemudian penyerangan dilakukan secara frontal. Perubahan ini disebabkan karena munculnya modernitas yang mengajarkan sistem organisasi sehingga kaum petani mempelajari hal tersebut dan mempraktikkannya.

Di antara perlawanan besar yang terjadi di Asia Tenggara adalah apa yang berlangsung di Vietnam.

Seperti yang telah disebutkan di atas pemicu utamanya adalah persoalan penarikan pajak (taxation) dan proletarisasi. Kontradiksi-kontradiksi dari sistem yang ada memicu nasionalisme. Persentuhan dengan penulis-penulis abad pencerahan Perancis yang merupakan tradisi dari sosialis Eropa. Perlawanan di Vietnam dilakukan oleh para petani dengan didukung oleh kelas intelektual. Kalangan-kalangan terdidik yang belajar di Eropa, setelah menikmati kebebasan dan kehidupan Eropa dan persamaan hak menemukan kenyataan terbalik terjadi di Vietnam. Keadaan ini mendorong mereka untuk memberontak. Gerakan selanjutnya menjadi lebih terorganisir dan sistematis. Dimulai oleh partai nasional Vietnam yang terdiri dari pegawai negeri, bisnisan menengah, pedagang dan pegawai perusahaan. Gerakan politik ketiga dilakukan oleh partai komunis yang didahului dengan kelompok-kelompok Marxists yang terdiri dari guru, siswa dan pegawai rendahan. (Eric Wolf, 1999).

Hal yang sama juga terjadi di Filipina. Sementara juga terdapat

gerakan kecil yang dilakukan oleh para petani sendiri. Menurut Kerkvliet perlawanan yang dilakukan oleh petani yang terjadi di Filipina dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap keadaan ekonomi dan sosial dasar termasuk pemberlakuan pajak. Untuk merespon persoalan ini mereka melakukan protes. Protes pertama dilakukan dengan membentuk perlawanan dilakukan oleh petani yang tidak memiliki tanah kepada tuan tanah. Kemudian dilanjutkan ke pimpinan politik dan juga pemerintah. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi besar. Bentuk-bentuk protes yang dilakukan bermacam-macam mulai dari menyerang tuan tanah, mandor, demo upah, menempuh keadilan di pengadilan, memilih juru bicara untuk jawatan politik dan lainnya.

Beberapa kelompok perlawanan juga terjadi di Banten namun dengan beberapa titik perbedaan. Faktor yang mempengaruhinya juga ada kaitannya dengan pajak uang. Kenaikan biaya pajak dan ditambah dengan minimnya uang juga

murahnya harga produk tani membuat pemberontakan terjadi di Banten. Namun perlawanan yang terjadi di sana lebih kompleks. Terpecahnya sistem sosial dan sistem politik tradisional dan bertalian dengan terganggunya nilai-nilai tradisional oleh kehadiran modernitas.

Dalam perlawanan yang terjadi di Banten elit lokal ikut terlibat. Ini disebabkan keberadaan penguasa kolonial tidak memberi tempat dan fungsi utuh kepada beberapa kalangan aristokrat dan elit agama. Sebagai akibatnya meraih pengaruh dan berhasil memperoleh dukungan di tengah-tengah masyarakat. Di antara faktor pendukungnya adalah imajinasi kembalinya era kesultanan yang membebaskan mereka dari pajak dan sistem kerja yang eksploitatif. Perlawanan tersebut tidak semata-mata karena sistem administrasi saja tetapi juga karena sentimen ketidaksenangan kepada penguasa asing dan juga disertai dengan sentimen agama.

Sentimen agama adalah di antara alat yang menggerakkan massa terutama dengan doktrin

perang suci terhadap penguasa kolonial yang diserukan diam-diam melalui tarekat-tarekat pengajian. Pengaruh ini disebabkan tidak hanya oleh kalangan elit agama di tingkat lokal tetapi juga keterhubungan mereka dengan dunia arab saat menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Semangat pan - islamisme yang tumbuh dalam dunia muslim menambah semangat perlawanan terhadap penguasa asing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme di Banten lebih kuat dipengaruhi oleh gagasan keislaman yang dipadu dengan imajinasi mengembalikan tatanan lokal.

### **Kesimpulan**

Kolonialisme adalah faktor utama terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh petani di Negara-negara di Asia Tenggara. Pemicunya adalah masuknya logika ekonomi kapitalisme yang merupakan pengaruh utama dan menjadi transisi dari sistem feodalisme. Beberapa dampak dari ini adalah terjadinya proses proletarianisasi yaitu pemisahan

pekerja dari sarana produksi. Pemberlakuan sistem monetasi dan pajak yang menguras masyarakat. Di beberapa tempat lain juga mengalami dampak sosial dari masuknya modernitas. Kesemua ini menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat sehingga memicu terjadinya perlawanan.

Dalam pemberontakan yang terjadi di Banten, elit lokal yang terlibat dalam pemberontakan memiliki kekuasaan yang lebih kecil. Dan mereka memiliki pengaruh kecil dalam administrasi kolonial. Rata-rata mereka adalah residen. Sementara di Filipina dan Vietnam pemberontakan utama dipicu oleh keadaan yang menjepit seperti pemberlakuan taxation, dan pemisahan lahan, pemberontakan di Banten dipicu juga ditambah oleh beberapa faktor lain. Di antaranya adalah suatu tradisi melawan yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Banten. Kedua adalah faktor perubahan sosial dan politik. Runtuhnya sistem tua dan masuknya modernisasi telah menimbulkan alienasi bagi masyarakat. Selain itu adalah faktor munculnya persoalan agama yang

memicu semangat perlawanan bagi masyarakat. Namun di antara hal yang menyamakan pemberontakan di tiga tempat ini adalah persoalan diberlakukannya sistem uang yang memicu terjadinya praktik taxation.

Meski perlawanan dibantu oleh elit lokal. Terdapat beberapa perbedaan dalam hal jabatan dan pengaruh yang dimiliki oleh elit lokal tersebut. Pemberontakan petani yang terjadi di Vietnam dipimpin oleh kaum-kaum terdidik yang belajar di Eropa sementara perlawanan yang terjadi di Banten dipimpin oleh petinggi agama seperti para haji. Saya berasumsi bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para haji ini memiliki pengaruh dari pan-islamisme di Mekkah ketika mereka menuntut ilmu di Mekkah. Sementara di Vietnam mereka dipimpin oleh kaum terpelajar yang mengenyam pendidikan di Eropa yang ketika pulang mendapati suatu ketimpangan yang jauh antara apa yang terjadi di Eropa yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan ketimbang apa yang terjadi di Vietnam.

## Referensi

- Bernstein, Henry. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, N.S.: Sterling, VA: Lynne Rienner Publishers.
- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Sosial Movements in Indonesia*. Brill.
- Kartodirdjo, Sartono. 1974. "Bureaucracy and Aristocracy. The Indonesian experience in the XIXth century." *Archipel* 7 (1): 151-68. doi:10.3406/arch.1974.1165.
- Kerkvliet, Benedict J. 1972. "Peasant Rebellion in the Philippines: The Origins and Growth of the HMB." University of Wisconsin.
- O'Flaherty, Wendy Doniger. 1981. *Siva: The Erotic Ascetic*. Oxford University Press.
- Scott, James C. 2009. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Yale University Press.
- Wolf, Eric Robert. 1999. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New edition edition. Norman: University of Oklahoma Press.